

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang terus mengalami dinamika seiring dengan tantangan global dan kebutuhan pembangunan nasional. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerataan ekonomi, diperlukan sistem ekonomi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Salah satu usaha yang telah lama diterapkan ialah pengembangan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Hal tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai entitas usaha yang menghimpun individu untuk bergerak sesuai prinsip perkoperasian serta pilar ekonomi rakyat. Kehadiran koperasi ini menjadi salah satu strategi lama yang diaplikasikan pemerintah untuk membangun organisasi ekonomi warga yang bersendikan semangat gotong royong dan rasa kekeluargaan. Koperasi mempunyai peranan untuk meningkatkan kualitas hidup anggota serta ada di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan produk atau jasa. Menurut Haryanto (2020), peran koperasi dalam memberdayakan anggotanya diwujudkan melalui penyediaan program pelatihan, pendidikan, serta perluasan akses pasar, yang dapat mendorong daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Koperasi juga berfungsi sebagai solusi finansial inklusif dengan memfasilitasi akses modal bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan pada akses keuangan.. Realisasi tujuan koperasi, bukanlah pekerjaan yang mudah karena ketika terjadi

kegagalan atau kelalaian dalam pengelolaannya maka dapat berdampak buruk pada keberlangsungan koperasi (Darmayanti, 2020).

Keberlangsungan koperasi merupakan kemampuan koperasi dalam bertahan dan berkembang secara berkelanjutan, dengan tetap memenuhi tujuan utamanya. Keberlangsungan usaha koperasi dapat dicapai jika koperasi memiliki kinerja finansial seperti Sisa Hasil Usaha (SHU) yang optimal dan membawa kontribusi positif bagi lingkungan sosial (Wisnuwardhani, 2018). Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi di Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan koperasi. Tercatat ada sebanyak 3.399 koperasi aktif yang tersebar di delapan kabupaten dan satu kota madya yang ada di Provinsi Bali. Jumlah ini mencerminkan tingginya antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis koperasi. Namun berdasarkan data keragaan koperasi Provinsi Bali, dalam tiga tahun terakhir nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi-koperasi masing-masing kabupaten/kota mengalami ketidakstabilan.

Tabel 1.1 Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi di Provinsi Bali tahun 2021-2023

No.	Kabupaten/ Kota	2021	2022	2023
1	Denpasar	113,008,248,467	70,782,171,619	71,552,393,341
2	Buleleng	13,951,480,635	13,918,322,819	18,974,499,463
3	Karangasem	13,659,634,414	11,070,897,646	8,705,599,141
4	Bangli	16,674,206,903	18,368,957,540	14,187,051,020
5	Klungkung	11,813,435,666	10,888,577,174	10,313,429,253
6	Gianyar	404,888,821,088	26,048,696,286	31,746,075,977
7	Badung	96,807,648,823	62,848,450,336	145,367,387,796
8	Tabanan	24,856,826,629	18,151,043,345	19,158,098,303
9	Jembrana	7,477,959,000	8,928,638,729	9,777,100,015

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, 2021, 2022, 2023

(<https://diskopukm.baliprov.go.id/data-dan-informasi/data-koperasi/>)

(data diolah, 2025)

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi-koperasi di provinsi Bali pada tiap kabupaten/kota mengalami ketidakstabilan nilai SHU dalam rentang tahun 2021-2023. Diantara sembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Karangasem menunjukkan penurunan nilai SHU selama periode tiga tahun berturut-turut. Selain itu, Juniasa dalam detik.com (2025) mengungkapkan bahwa koperasi di Kabupaten Karangasem yang berjumlah 341 koperasi, 107 diantaranya dinyatakan tidak aktif atau bangkrut.

Tabel 1. 2 Sebaran Koperasi di Kabupaten Karangasem pada tahun 2024

No.	Kecamatan	Koperasi (unit)		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Abang	18	5	23
2	Bebandem	20	9	29
3	Karangasem	78	38	116
4	Kubu	16	8	24
5	Manggis	21	16	37
6	Rendang	35	21	56
7	Selat	29	7	36
8	Sidemen	17	3	20
	Jumlah	234	107	341

Dari delapan kecamatan yang terdapat di Kabupaten Karangasem, jumlah koperasi terbanyak terdapat di Kecamatan Karangasem, begitu juga dengan jumlah koperasi yang tidak aktif. Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Karangasem, I Gede Loka Santika, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ratusan koperasi tersebut tidak aktif, diantaranya akibat pandemi Covid-19, erupsi Gunung Agung beberapa tahun lalu, serta tidak terlaksananya Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama lebih dari tiga tahun berturut-turut, yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan forum tertinggi dalam koperasi yang berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban pengurus kepada anggota serta evaluasi kinerja tahunan. Selain disebabkan oleh faktor alam, ketiadaan RAT juga disebabkan rendahnya tanggung jawab manajemen koperasi dalam mengelola koperasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Perindag Karangasem, I Gede Loka Santika dalam Radar Bali.id (2024) yang menyatakan bahwa pengurus maupun anggotanya tidak melaksanakan kewajibannya untuk menghidupkan koperasi sehingga keberlangsungan koperasi terancam. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan staf Bidang Koperasi Kabupaten Karangasem, penyebab banyaknya koperasi belum melakukan RAT yakni karena faktor eksternal seperti Erupsi Gunung Agung menyebabkan banyak anggota yang menarik uang simpanan di koperasi secara bersamaan sehingga modal koperasi habis dan kredit macet meningkat. Lalu, faktor internal seperti rendahnya kompetensi sumber daya intelektual yang ditunjukkan dengan adanya pegawai yang memakai uang simpanan untuk kepentingan pribadi hingga pembuatan laporan keuangan tidak tepat waktu menyebabkan tertunda atau tidak terlaksananya RAT. Kondisi tersebut menunjukkan sebagai upaya menjaga keberlangsungan, koperasi memiliki kendali melalui penguatan faktor internal dalam menghadapi ketidakpastian faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan

Berdasarkan fenomena tersebut, *Resource-Based Theory* (RBT) memaparkan bahwa keberhasilan perusahaan dalam memenangkan kompetisi pasar dan menjaga keberlanjutan bisnisnya sangat bergantung pada kepemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan aset strategis internal. Prinsip-prinsip *Good*

Corporate Governance (GCG) dipandang sebagai sebuah kapabilitas strategis internal organisasi yang sangat krusial dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Selain itu, strategi yang berpotensi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif pada perusahaan yakni melalui integrasi antara sumber daya berwujud dan tidak berwujud (Utami & Alamanos, 2025). Aset berwujud dapat berupa kas yang perlu dikelola secara efektif dan akuntabel, serta disajikan lewat pelaporan keuangan yang berkualitas dan sesuai regulasi akuntansi. Di sisi lain, koperasi juga didukung oleh komponen tidak berwujud yang dimiliki oleh koperasi dapat berupa modal intelektual yang terdiri dari modal manusia, modal struktural, dan modal relasional.

Good Corporate Governance (GCG) mengacu pada sistem tata kelola perusahaan yang sehat dengan berdasarkan pada lima pilar utama, yaitu keterbukaan (transparansi), akuntabilitas, tanggung jawab (responsibilitas), kemandirian (independensi), serta kesetaraan dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang efektif dalam koperasi dapat meningkatkan kepercayaan daripada anggota dan pemangku kepentingan lainnya. Koperasi-koperasi di Kabupaten Karangasem khususnya pada Kecamatan Karangasem, prinsip-prinsip GCG masih sangat rendah yang dibuktikan dengan adanya 107 dari 341 koperasi yang tidak melaksanakan RAT selama lebih dari tiga tahun (Juniasa dalam detik.com, 2025). Berdasarkan prinsip-prinsip GCG, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip *Responsibility* dan *Accountability*. Jika pengurus koperasi memiliki tanggung jawab manajerial yang kuat (*responsibility*) serta sistem pelaporan yang akuntabel, maka kegiatan seperti

RAT akan berjalan sesuai ketentuan dan koperasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada anggota.

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh prinsip-prinsip GCG masih mengalami ketidakkonsistenan. Keberlangsungan koperasi di wilayah Kecamatan Buleleng, Bali, terbukti dipengaruhi secara positif dan nyata oleh penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), sebagaimana ditemukan dalam studi Widiartini & Dewi (2024). Temuan ini membuktikan bahwa tata kelola yang sehat berkontribusi langsung pada penguatan daya tahan organisasi sekaligus peningkatan performa finansialnya secara berkelanjutan. Begitu pula dengan riset yang dilakukan oleh Adnyani dkk. (2021) menjelaskan bahwa GCG memberikan dampak positif yang nyata terhadap performa organisasi. Melalui tata kelola yang sehat, sebuah lembaga atau organisasi dapat beroperasi dengan lebih optimal, sistematis, dan efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa jika organisasi memiliki tata kelola berupa GCG yang baik maka akan menciptakan suatu organisasi yang baik dan efisien. Penelitian oleh Handayani dkk. (2024) mengungkapkan bahwa variabel akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan kewajaran memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana. Namun, variabel transparansi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan koperasi. Namun, berbeda dengan penelitian oleh Pulungan dkk. (2024) yang mendapatkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari GCG terhadap kinerja koperasi di Kabupaten Simalungun, kondisi ini dipicu oleh faktor kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memupuni. Berbeda dari aspek lainnya, penelitian oleh Ningsih & Bagana (2022) menjelaskan bahwa

transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja nonkeuangan, sedangkan tanggung jawab berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja non keuangan. Inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh prinsip-prinsip GCG terhadap keberlangsungan atau kinerja organisasi dapat disebabkan karena perbedaan karakteristik objek penelitian, seperti jenis organisasi (koperasi, LPD, ataupun perusahaan) serta perbedaan kapasitas pengelolaan dan pengawasan dalam menerapkan seluruh prinsip-prinsip GCG.

Penurunan nilai SHU juga menjadi indikator kurang baiknya pengelolaan keuangan koperasi. Faktor yang dapat mempengaruhi kondisi ini yakni kualitas laporan keuangan yang belum memenuhi prinsip relevan, andal, dan transparan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan juga menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan RAT. Laporan keuangan yang disusun tanpa mengikuti standar akuntansi dapat menghambat pengurus dalam mengambil keputusan strategis dan transparansi kepada anggota. Reputasi dan kepercayaan dalam pelaporan keuangan juga menjadi aspek penting dalam *resource-based theory*. Penyusunan laporan keuangan yang baik menjadi representasi dari akurasi dan kredibilitas kondisi finansial suatu entitas. Standar kualitas ini tidak hanya mutlak dipenuhi oleh perusahaan skala besar, melainkan juga oleh koperasi. (Andarista & Sinarwati, 2022).

Penelitian studi oleh Turi & Muharram (2023) menemukan bahwa prinsip transparansi pada laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepercayaan anggota koperasi. Kepercayaan anggota yang tinggi dapat mendukung keberlangsungan koperasi. Begitu pula dengan penelitian dari Meilisa Amalia (2023) dan Aulia & Hamdani (2020) yang menegaskan bahwa kualitas

informasi dalam laporan keuangan memegang andil positif yang sangat signifikan. Kualitas finansial yang baik ini berkontribusi langsung dalam mendorong performa usaha sekaligus menjaga stabilitas kesehatan koperasi.

Lemahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola koperasi menjadi indikator rendahnya modal intelektual (*intellectual capital*) yang dimiliki. Pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pengurus sangat menentukan kemampuan koperasi dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan keberlanjutan organisasi. Dalam kerangka *resource-based theory*, modal intelektual diakui sebagai sumber daya krusial yang bersifat eksklusif dan bernilai strategis dan berpotensi dalam mendukung berjalannya suatu bisnis untuk mewujudkan keunggulan kompetitif dan pertumbuhan kinerja yang berkesinambungan. Konsep IC terdiri dari tiga komponen utama, yakni modal manusia (pengetahuan dan keterampilan SDM), modal struktural (proses, sistem, dan database), serta modal relasional hubungan dengan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan (Bataineh & Al Zoabi, 2011).

Menurut Zulki Zulkifli (2021), *human capital* mendefinisikan kemampuan individu dalam koperasi untuk menghasilkan solusi, inovasi, dan perbaikan berkelanjutan melalui pengetahuan yang dimiliki anggotanya. Melalui modal manusia yang baik maka diharapkan dapat mengembangkan modal struktural. *Structural capital* atau modal struktural merupakan kapabilitas organisasi dalam memfasilitasi sistem, prosedur, dan struktur kerja yang mampu mendorong produktivitas maksimal para anggotanya. *Relational capital* merupakan hubungan yang harmonis (*association network*) yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak eksternal. Apabila koperasi dapat mengelola dan mengembangkan *intellectual*

capital dengan baik, maka kemampuan bersaing, pertumbuhan organisasi, serta keberlangsungan koperasi akan semakin meningkat.

Temuan terdahulu mengenai dampak *intellectual capital* masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) membuktikan adanya pengaruh positif serta signifikan dari modal intelektual tersebut terhadap performa operasional perusahaan. Sejalan dengan penelitian oleh Novandalina & Budiyo (2021), Arifin (2023), dan Aziz dkk. (2024) yang menegaskan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja koperasi serta menjadi pendorong keberlanjutan organisasi. Namun, penelitian oleh Zacharias (2020) menyatakan hanya *structural capital* yang berpengaruh terhadap keunggulan daya saing secara berkelanjutan. Penelitian oleh Savila & Chariri (2025) dan Pramesti dkk. (2023) menyatakan *intellectual capital* tidak membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi atau perusahaan. Adanya inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh variabel *intellectual capital* terhadap keberlangsungan ataupun kinerja organisasi juga dapat disebabkan karena perbedaan karakteristik objek penelitian yang menyebabkan adanya perbedaan tingkat pemanfaatan dan pengelolaan *intellectual capital*.

Pada penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian sehingga menyebabkan adanya *research gap* atau kesenjangan pada beberapa variabel. Penelitian ini didasarkan pada penelitian Widiartini & Dewi (2024) terkait keberlangsungan Koperasi di Kecamatan Buleleng. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang berbeda, yaitu penggunaan variabel kualitas laporan keuangan dan *intellectual capital* pada variabel independen.

Kedua variabel tersebut saat ini masih relatif jarang diteliti dalam pengaruhnya terhadap keberlangsungan organisasi. Lokasi penelitian memiliki perbedaan, penelitian ini dilaksanakan pada koperasi di Kecamatan Karangasem sebagai kecamatan yang memiliki jumlah koperasi terbanyak di Kabupaten Karangasem dan juga merupakan kecamatan yang memiliki potensi besar menghadapi kebangkrutan diantara kecamatan lainnya.

Dengan demikian, pada penelitian kali ini peneliti akan meneliti kembali terkait variabel penerapan pola pikir prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), kualitas laporan keuangan, dan *intellectual capital* tersebut khususnya yang diimplementasikan pada badan usaha koperasi. Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **“Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Kualitas Laporan Keuangan, dan *Intellectual Capital* terhadap Keberlangsungan Koperasi di Kecamatan Karangasem”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Koperasi di Kabupaten Karangasem mengalami penurunan dalam perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan sebanyak 107 dari 341 koperasi dinyatakan tidak aktif.
2. Koperasi-koperasi di Kecamatan Karangasem menjadi koperasi yang berpotensi tidak aktif terbanyak di Kabupaten Karangasem.
3. Tidak terlaksananya Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin mencerminkan lemahnya tata kelola dan permodalan dalam organisasi.

4. Penyusunan laporan keuangan yang tidak tepat waktu juga menjadi salah satu faktor tidak terlaksananya Rapat Anggota Tahunan pada koperasi di Kecamatan Karangasem.

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Subjek penelitian difokuskan pada koperasi di Kecamatan Karangasem.
2. Objek penelitian ini difokuskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), kualitas laporan keuangan, *intellectual capital* dan keberlangsungan koperasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, rumusan masalah penelitian ini disusun sebagai berikut.

1. Apakah prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlangsungan koperasi di Kecamatan Karangasem?
2. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlangsungan koperasi di Kecamatan Karangasem?
3. Apakah *intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlangsungan koperasi di Kecamatan Karangasem?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bagi keberlangsungan koperasi di Kecamatan Karangasem.

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan bagi keberlangsungan koperasi di Kecamatan Karangasem.
3. Untuk menganalisis pengaruh *intellectual capital* bagi keberlangsungan koperasi di Kecamatan Karangasem.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan Resource-Based Theory dengan menegaskan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), kualitas laporan keuangan, dan *intellectual capital* sebagai kapabilitas internal strategis dalam mendasari terciptanya keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi koperasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris bagi peneliti berikutnya yang mendalami topik serupa serta untuk memahami lebih dalam mengenai indikator apa saja yang mempengaruhi keberlangsungan usaha pada koperasi.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem

Mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi Dinas Koperasi Kabupaten Karangasem dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembinaan, pengawasan, dan pelatihan koperasi, khususnya dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), peningkatan kualitas laporan keuangan, serta pengelolaan *intellectual capital*.

b. Bagi Koperasi

Mampu menambahkan informasi untuk pihak koperasi terkait pentingnya implementasi prinsip-prinsip GCG, *Intellectual capital*, dan kualitas laporan keuangan untuk mendukung pengelolaan koperasi yang maksimal.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai sarana implementasi keilmuan bagi peneliti untuk meningkatkan daya analisis, wawasan komprehensif, dan penguasaan konseptual terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan koperasi.

